

PARTISIPASI PETANI DALAM PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT LESTARI: KASUS DI DESA CIKEUSAL DAN DESA KANANGA KABUPATEN KUNINGAN

Farmer Participation on Sustainable Private Forest Management: Case of Cikeusal and Kananga Villages, Kuningan District

Asep Sudrajat¹, Hardjanto, dan Leti Sundawati

Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB
¹E-mail: sudrajatasep876@ymail.com

ABSTRACT

Kuningan District is one of the largest private forest in West Java. Private forests of Cikeusal and Kananga Villages have certified by SVLK (verification of wood legality system) by 2013. Meanwhile, participation pattern on private forest under the SVLK certification has not been identified, hence it is important to know their performance in order to maintain and improve their forest. The aims of the research were : (1) to know the farmers participation pattern on private forest, (2) to analyze factors affected to the participation on sustainable private forest management, and (3) to analyze the impact of farmers participation on sustainability of private forest and farmer welfare. The research has conducted through survey approach. Data collection was conducted by sensus on 114 farmers, and the data analysis used qualitative descriptive method and pathway analysis. The result of this research showed that farmers participation were low, passive, and used a top down approach, either in Cikeusal or Kananga Villages. These participation generally were shaped by muscles and materials. It was conducted on entire private forest activities, including: planning, execution, and utilization phases. Internal and external factors, as well as farmer competence were significant factors to influence farmers participation on private forest management and sustainability of private forest. However there were not significant to influence farmer welfare.

Key words : *certification, farmer participation, Kuningan, private forest, welfare.*

PENDAHULUAN

Hutan rakyat telah banyak berkembang dan mendapat tempat dalam alokasi penggunaan lahan di Jawa. Peran hutan rakyat sangat penting dalam memajukan industri kehutanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki kualitas lahan, dan menjaga kesuburan tanah serta tata air (Priyambodo 2010; Dewi *et al.* 2004). Hutan rakyat saat ini semakin menunjukkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan kayu bagi industri perkerajinan terutama di Jawa. Kayu dari hutan rakyat banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan kayu untuk keperluan konstruksi bangunan, mebel, kerajinan yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf ekonomi petani. Produktivitas hutan rakyat mencapai 2.29 m³/ha/tahun, tiga kali lebih tinggi dari produktivitas hutan Perhutani yang sebesar 0.73 m³/ha/tahun (Arupa 2011). Disamping memiliki manfaat secara ekonomi, hutan rakyat memiliki manfaat secara ekologis. Hal ini dapat dilihat dari fungsinya dalam menjaga dan mendukung kualitas lingkungan, menahan erosi, mengurangi bahaya banjir, menjaga dan memperbaiki kondisi tata air, dan sebagainya.

Hutan rakyat di Kabupaten Kuningan tercatat seluas 15 446.90 ha yang didominasi oleh jenis sengon, jati dan mahoni (Achmad *et al.* 2004). Hutan rakyat di Kabupaten Kuningan merupakan salah satu hutan rakyat

yang berhasil disertifikasi dengan skema SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) pada tahun 2013. Dua desa diantaranya adalah Desa Cikeusal dan Desa Kananga.

Sebagai sebuah capaian strategis, sertifikasi hutan rakyat idealnya dapat mendorong petani untuk berpartisipasi mempertahankan sertifikasi yang telah diterimanya. Secara konseptual, partisipasi petani dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal (Diniyati & Awang 2010; Waskito 2000; Ndraha 1990), serta berproses dalam setiap tahapan (perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan). Hal yang penting lainnya sebagai bagian dari proses partisipasi dalam berbagai tahapan kegiatan hutan rakyat adalah keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, termasuk di dalamnya keputusan menentukan pilihan jenis, sistem silvikultur, waktu panen, dan pilihan operasional lainnya.

Hingga saat ini, partisipasi petani di Kabupaten Kuningan dalam pengelolaan hutan rakyat setelah disertifikasi dan dalam rangka mempertahankan sertifikasinya belum diketahui dan diukur. Oleh karena itu penting untuk dievaluasi dan dikaji perkembangan hutan rakyat di Kuningan pasca sertifikasi sampai dengan sekarang agar diketahui: bagaimana petani berpartisipasi dalam mempertahankan kelestariannya, apa saja yang berpengaruh terhadap partisipasi petani dimaksud, bagaimana representasi gender dalam partisipasi pengelolaan hutan rakyat, serta bagaimana

pengaruh partisipasi terhadap capaian kelestarian hutan rakyat dan kesejahteraan petani. Informasi-informasi tersebut sangat penting untuk mengevaluasi kinerja hutan rakyat (evaluasi *on going process*) agar sertifikasi dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan, termasuk dapat direplikasi di tempat lain dengan penyesuaian tertentu.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Memahami tingkat partisipasi petani hutan rakyat di Kabupaten Kuningan,
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi petani dalam pengelolaan hutan rakyat lestari
3. Menganalisis pengaruh partisipasi petani terhadap kelestarian dan kesejahteraan petani hutan rakyat di Kabupaten Kuningan.

METODE PENELITIAN

Kerangka Pemikiran

Konsepsi utama yang melandasi penelitian ini adalah partisipasi. Konsep partisipasi digunakan untuk menjelaskan bagaimana petani hutan rakyat terlibat dalam pengelolaan hutan rakyat, seberapa tinggi keterlibatannya, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya dan pengaruhnya terhadap kelestarian hutan rakyat dan kesejahteraan petani.

Partisipasi petani akan ditelaah pada tiga komponen. Pertama, penelitian ini akan mengidentifikasi tingkat partisipasi petani hutan rakyat, seberapa jauh partisipasi tersebut terjadi, dan pada tahapan apa partisipasi tersebut terjadi. Kedua, kajian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi petani hutan rakyat. Ketiga, penelitian ini mengukur pengaruh partisipasi terhadap kelestarian hutan rakyat dan kesejahteraan petani.

Tingkat partisipasi petani dapat tercermin dalam berbagai tahapan kegiatan pengelolaan hutan rakyat. Tahapan pengelolaan terdiri atas tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan. Partisipasi petani pada pengelolaan hutan rakyat dapat berbentuk ide/gagasan/pemikiran, biaya, maupun tenaga.

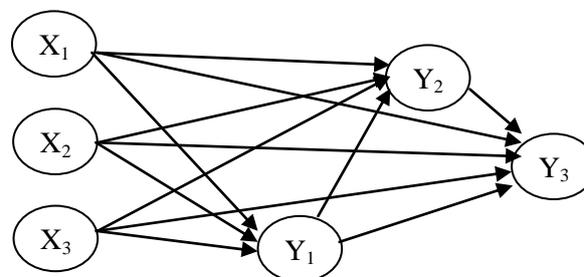
Faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi petani hutan rakyat dapat berasal dari internal, faktor eksternal, dan kompetensi petani (Diniyati & Awang 2010; Waskito 2000; Ndraha 1990; Fauzi 2009). Faktor internal petani meliputi: umur, pendidikan formal/nonformal, jumlah tanggungan keluarga, luas lahan usahatani, pengalaman berusahatani, dan motivasi berusaha. Faktor eksternal meliputi: penyuluhan kehutanan, kelompok tani hutan, dan sumber informasi. Adapun kompetensi petani mencakup kompetensi teknis, kompetensi konseptual, dan kompetensi relasional. Kompetensi petani dipisahkan dari faktor internal karena sifatnya yang lebih komprehensif dan faktor pembentuknya yang lebih kompleks (Fauzi 2009; Spencer dan Spencer 1993). Berbeda dengan faktor internal lain (misalnya umur, pendapatan, dan lain-lain)

cenderung lebih berkarakter dasar internal petani yang faktor pembentuknya alami dan tidak kompleks.

Kemampuan atau kompetensi petani dalam mengelola hutan rakyat merupakan faktor yang mendukung keberhasilan pengelolaan hutan rakyat (Waskito 2000). Kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kompetensi atau kemampuan awal untuk berkembang secara mandiri (Ndraha 1990).

Meningkatnya partisipasi petani dalam pengelolaan hutan rakyat diharapkan berdampak pada kelestarian hutan rakyat itu sendiri dan kesejahteraan petani. Kelestarian hutan rakyat sertifikasi VLK dicirikan oleh indikator: 1) kepemilikan lahan, 2) aspek ketenagakerjaan, dan 3) aspek sosial dan lingkungan dalam penebangan. Variabel-variabel tersebut digunakan juga dalam penelitian Sumarlan *et al.* (2012), Ritchie *et al.* (2001), dan Suprayitno *et al.* (2011), walaupun tidak persis melakukan klasifikasi internal, eksternal dan kompetensi.

Kesejahteraan merupakan hasil pencapaian proses pemberdayaan yang melibatkan citra diri kelompok yang diperdayakan dilengkapi ketersediaan sumberdaya. Salah satu faktor kesejahteraan adalah pendapatan (Ress 1991; Edi 2013). Pendapatan petani diperoleh dari berbagai jenis tanaman yang diusahakan dalam areal hutan rakyat. Hasil hutan rakyat berkontribusi bagi pendapatan petani dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan (Attar 2000). Hutan rakyat diharapkan menjadi asset produksi bagi petani dan alternatif sumber pendapatan keluarga. Hubungan antar peubah sebagai kerangka pemikiran penelitian disusun sebagai berikut.



Gambar 1 Diagram model persamaan struktural untuk analisis jalur.

Keterangan :

X1: faktor internal, X2: faktor eksternal, X3: kompetensi petani, Y1: partisipasi, Y2: kelestarian, Y3: kesejahteraan

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Cikeusal dan Desa Kananga. Kedua desa tersebut terletak di Kecamatan Cimahi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan pertimbangan, antara lain: 1) lokasi tersebut merupakan kecamatan yang memiliki areal hutan rakyat yang dikelola petani yang tergabung dalam kelompok tani hutan, dan 2) kelompok tani hutan rakyat telah memperoleh sertifikat SVLK. Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan (Januari s/d Maret 2015).

Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Nazir 2002). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang. Keadaan nyata sekarang dalam penelitian ini adalah hubungan antara peubah bebas yaitu: faktor internal (X_1) meliputi umur, pendidikan formal/non formal, jumlah tanggungan keluarga, luas lahan usahatani, pengalaman berusahatani, dan motivasi berusaha; faktor eksternal (X_2) meliputi penyuluhan kehutanan, kelompok tani hutan dan sumber informasi; kompetensi petani (X_3) terdiri: atas kompetensi teknis, kompetensi konseptual, dan kompetensi relasional, dan partisipasi petani (Y_1) meliputi partisipasi perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan; peubah terikat yaitu kelestarian hutan rakyat (Y_2) yang terdiri atas; kepemilikan lahan, aspek ketenagakerjaan, dan aspek sosial dan lingkungan dalam kegiatan penebangan, serta kesejahteraan petani hutan rakyat (Y_3) meliputi kesejahteraan sosial dan kesejahteraan ekonomi (Sevilla *et al.* 1993).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi dan wawancara secara sensus pada 2 kelompok tani di kedua desa. Total responden adalah 114 orang. Data sekunder diperoleh dari kantor dinas kehutanan setempat, kantor kecamatan setempat, dan kantor desa setempat, serta instansi lain yang terkait.

Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode yang sesuai dengan tujuan penelitian. Tingkat partisipasi petani dalam pengelolaan hutan rakyat dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Analisis deskriptif kuantitatif dilakukan dengan tabulasi yang merepresentasikan jumlah dan persentase. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan untuk menjelaskan secara mendalam atas fenomena tertentu pada faktor-faktor yang dianalisis. Tingkat partisipasi petani dianalisis pada tahap persiapan/pembukaan lahan, pelaksanaan (penanaman, pemeliharaan), dan tahap pemanfaatan (pemanenan, dan pemasaran hasil).

Hubungan antar faktor untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi partisipasi petani, serta pengaruh partisipasi terhadap kelestarian hutan rakyat dan kesejahteraan petani dianalisis menggunakan Analisis Jalur (Rutherford *et al.* 1993; Garson 2003). Formula Analisis Jalur adalah :

$$Y_1 = \gamma_{14}X_1 + \gamma_{24}X_2 + \gamma_{34}X_3 + \epsilon_1$$

$$Y_2 = \gamma_{11}X_1 + \gamma_{21}X_2 + \gamma_{31}X_3 + \gamma_{41}Y_1 + \epsilon_1$$

$$Y_3 = \gamma_{12}X_1 + \gamma_{22}X_2 + \gamma_{32}X_3 + \gamma_{42}Y_1 + \beta_{12}\gamma_{11} + \epsilon_1$$

Dimana : X_1 = Faktor Eksternal

X_2 = Faktor Internal

X_3 = Kompetensi Petani

Y_1 = Partisipasi Petani

Y_2 = Kelestarian Hutan Rakyat

Y_3 = Kesejahteraan Petani

ϵ_1 = Error₂

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Partisipasi dalam Pengelolaan Hutan Rakyat

Partisipasi petani dalam pengelolaan hutan rakyat dalam penelitian ini diidentifikasi dalam 3 tahapan kegiatan, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil hutan rakyat. Pada tahap perencanaan, partisipasi yang diukur adalah keterlibatan petani dalam penentuan waktu pertemuan, peran petani dalam penentuan materi pertemuan, peran petani dalam penentuan pengurus kelompok tani, peran petani dalam memberikan pendapat, dan peran petani dalam pendanaan KTHR. Pada tahap pelaksanaan, partisipasi yang dikaji adalah keterlibatan petani (apakah dikerjakan sendiri atau diupahkan) dalam persiapan lahan, penanaman, dan pemeliharaan (pemupukan, penyiangan, pemangkasan, dan penjarangan). Adapun pada tahap pemanfaatan hasil hutan rakyat, partisipasi yang diukur adalah keterlibatan petani dalam pemanenan, transaksi penjualan, dan penggunaan kayu hasil hutan rakyat.

Partisipasi petani pada tahap perencanaan hutan rakyat menunjukkan pola keterlibatan petani sedikit berbeda di kedua desa lokasi penelitian. Petani hutan rakyat di Desa Cikeusal teridentifikasi lebih bervariasi dalam kadar keikutsertaannya pada tahap perencanaan. Mayoritas petani di Cikeusal kadang-kadang terlibat dalam penentuan waktu pertemuan dan memberikan pendapat. Pada penentuan materi pertemuan dan pendanaan KTHR tidak terjadi partisipasi petani. Partisipasi petani yang relatif baik terjadi pada proses penentuan pengurus kelompok tani. Adapun partisipasi petani di Desa Kananga teridentifikasi rendah pada semua kegiatan perencanaan pengelolaan hutan rakyat. Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat di kedua desa lokasi penelitian cenderung rendah (Tabel 1).

Partisipasi petani pada tahap pelaksanaan pengelolaan hutan rakyat terlihat lebih baik dibandingkan pada tahap perencanaan. Sebagian besar petani di kedua desa banyak melakukan kegiatan hutan rakyat sendiri, dan tidak diupahkan. Jikapun pekerjaan hutan rakyat diupahkan, petani melakukan pengawasan langsung kepada buruh tani yang bekerja di kebunnya. Keterlibatan petani secara langsung memiliki pola yang sama antara kedua desa, dimana pada pembukaan/pembersihan lahan dan penanaman cenderung berintensitas sedang (mayoritas hanya kadang-kadang melakukan persiapan lahan sendiri), dan keterlibatan petani dalam kegiatan pemeliharaan cenderung berintensitas lebih tinggi (mayoritas selalu melakukan pemeliharaan dan pemangkasan sendiri).

Tabel 1 Partisipasi petani pada tahap pengelolaan hutan rakyat

Partisipasi	Cikeusal						Kananga					
	Tidak pernah		Kadang-kadang		Selalu		Tidak pernah		Kadang-kadang		Selalu	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Tahap perencanaan												
Penentuan waktu pertemuan	28	40.6	30	43.5	11	15.9	38	84.4	3	6.7	4	8.9
Penentuan materi	57	82.6	11	15.9	1	1.5	43	95.6	0	0	2	4.4
Penentuan pengurus	12	17.4	19	27.5	38	55.1	38	84.4	6	13.3	1	2.2
Memberi pendapat	17	24.6	48	69.6	4	5.8	31	68.9	11	24.4	3	6.7
Pendanaan KTHR	69	100	0	0	0	0	45	100	0	0	0	0
Tahap pelaksanaan												
Pembukaan/pembersihan lahan	6	8.7	42	60.9	21	30.4	2	4.4	37	82.2	6	13.3
Penanaman	4	5.8	43	62.3	22	31.9	2	4.4	35	77.8	8	17.8
Pemeliharaan	3	4.3	24	34.8	42	60.9	6	13.3	15	33.3	24	53.3
Pemangkasan	5	7.2	28	40.6	36	52.2	1	2.2	6	13.3	38	84.4
Penjarangan	28	40.6	23	33.3	18	26.1	14	31.1	5	11.1	26	57.8
Tahap pemanfaatan												
Pemanenan kayu	44	63.8	23	33.3	2	2.9	42	93.3	3	6.7	0	0
Pemanenan hasil pertanian	15	21.7	45	65.2	9	13	8	17.8	29	64.4	8	17.8
Penjualan hasil	23	33.3	17	24.6	29	42	36	80	2	4.4	7	15.6
Penggunaan kayu sendiri	21	30.4	44	63.8	4	5.8	36	80	9	20	0	0
Transaksi	26	37.7	20	28.9	23	33.3	36	80	2	4.4	7	15.6

Adapun partisipasi petani dalam tahap pemanfaatan hutan rakyat juga relatif rendah baik di Desa Cikeusal maupun di Desa Kananga. Pada umumnya petani tidak melakukan pemanenan dan penjualan kayu sendiri. Mereka menjual kayu hutan rakyat melalui tengkulak karena alasan kemudahan dan kepraktisan. Dengan demikian maka posisi tawar petani masih rendah, dimana tengkulak membeli dengan harga yang dikendalikan sendiri. Teknik estimasi potensi kayu juga tidak tepat, dimana tengkulak mengukur diameter batang setinggi jangkauan tangan, bukan setinggi dada (DBH, 1.30 m), sehingga ada kecenderungan hasil taksiran volumenya lebih rendah. Dalam pelaksanaannya jual beli kayu rakyat, baik penjual dan pembeli tidak membuat surat perijinan. Selain itu, dalam proses legalisasi kayu, di Desa Cikeusal maupun Kananga belum ada penerbit SKAU.

Diantara ketiga tahapan partisipasi, partisipasi yang signifikan terjadi pada tahap perencanaan dan tahap pemanfaatan. Adapun partisipasi pada tahap pelaksanaan tidak signifikan. Hal ini menggambarkan bahwa keterlibatan petani pada pelaksanaan/operasional hutan rakyat tidak begitu mempengaruhi partisipasi secara substansial, karena bersifat rutinitas di kebun atau ladang. Lain halnya keterlibatan petani pada tahap perencanaan dan pemanfaatan hasil hutan rakyat mampu mempengaruhi partisipasi petani secara substansial, karena lebih melibatkan aspek psikologi petani.

Jika merujuk pada tipe partisipasi menurut Blackburn *et al.* (1997), maka dapat dikatakan bahwa

partisipasi petani hutan rakyat di Desa Cikeusal dan Desa Kananga tergolong partisipasi pasif. Pada partisipasi pasif, orang berpartisipasi dengan diberitahu apa yang akan terjadi atau telah terjadi, dan merupakan pengumuman sepihak oleh administrasi atau manajemen proyek tanpa mendengarkan tanggapan masyarakat. Partisipasi hutan rakyat di lokasi penelitian didorong oleh pemberitahuan pihak tertentu (pemerintah dan pemberi proyek) akan adanya SVLK. Berdasarkan pemberitahuan tersebut, masyarakat dengan arahan tertentu dari pemerintah dan pemberi proyek kemudian mengatur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan target proyek. Adapun Aji *et al.* (2011) menyatakan bahwa partisipasi yang hanya menemui tokoh-tokoh atau elit desa lainnya untuk menjalankan program disebut sebagai partisipasi yang bersifat pragmatis.

Jika dikomparasikan dengan hutan rakyat di daerah lain, hasil penelitian ini relatif tidak banyak berbeda. Suprayitno *et al.* (2011) melaporkan rendahnya tingkat partisipasi petani sekitar hutan dalam pengelolaan hutan kemiri di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Rendahnya partisipasi ditunjukkan pada semua tahapan partisipasi yaitu dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, maupun pengawasan. Sementara Fauzi (2009) mencatat bahwa partisipasi petani dalam pengelolaan hutan rakyat di Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga berada pada kategori sedang. Partisipasi dalam perencanaan berada pada kategori tinggi, partisipasi dalam pelaksanaan termasuk dalam kategori sedang, dan partisipasi dalam pemanfaatan

hasil termasuk kategori sedang. Adapun pada kasus partisipasi masyarakat dalam program KBR di Kota Bajarbaru cukup rendah, sebagaimana diuraikan oleh Hapsari *et al.* (2012). Perbedaan tingkat partisipasi demikian disebabkan oleh perbedaan dinamika faktor-faktor internal dan eksternal yang terjadi dalam masyarakat, serta modal sosial yang dimilikinya.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Partisipasi petani dipengaruhi secara nyata oleh faktor internal, faktor eksternal, dan faktor kompetensi petani. Terkait faktor internal petani, menunjukkan bahwa variasi umur petani, pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, luas lahan hutan rakyat, dan pengalaman petani mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi mereka dalam pengelolaan hutan rakyat. Pengalaman petani yang relatif panjang menggambarkan peningkatan akumulasi pengetahuan petani dalam pengelolaan hutan rakyat.

Motivasi petani yang teridentifikasi karena dorongan sendiri dan dorongan pihak luar tidak mempengaruhi partisipasi petani. Motivasi karena dorongan sendiri memang ada, tapi tidak berkaitan dengan sertifikasi VLK, motivasi petani hanya berkebudaya untuk tabungan rumah tangga. Motivasi SVLK sangat dominan didorong oleh Dinas Kehutanan, sehingga terbangun partisipasi pasif dan bersifat *top down*. Dengan demikian rekayasa dinamika faktor internal petani dalam kelembagaan kelompok tani tidak dapat digunakan untuk membangkitkan partisipasi hutan rakyat. Petani generasi muda maupun generasi tua, petani berpendidikan tinggi maupun rendah, tanggungan keluarga banyak atau sedikit, berpengalaman ataupun tidak, ternyata pengaruhnya sama terhadap dinamika partisipasi.

Faktor eksternal memberikan pengaruh nyata bagi partisipasi petani dalam pengelolaan hutan rakyat. Perubahan pada faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi. Walaupun frekuensi penyuluhan relatif jarang dilakukan pada kelompok tani, namun petani merasakan manfaat kelompok bagi pertukaran pengetahuan dan informasi serta permodalan (Tabel 2). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi intensitas kegiatan penyuluhan, semakin baik fungsi kelompok tani, dan semakin tinggi akses informasi, akan secara nyata memberikan pengaruh bagi peningkatan kualitas partisipasi petani dalam pengelolaan hutan rakyat. Demikian juga jika sebaliknya. Kompetensi petani juga memberikan pengaruh nyata terhadap partisipasi. Namun dari ketiga macam kompetensi (teknis, konseptual, dan relasional), hanya kompetensi relasional yang secara nyata memberi pengaruh terhadap pembentukan kompetensi petani. Kompetensi teknis petani dalam kegiatan pengelolaan hutan rakyat relatif merata dimiliki oleh petani hutan rakyat. Sebagai contoh, para petani pada umumnya melakukan pemeliharaan dengan pemupukan 1 tahun 2 kali sampai umur 2 tahun, penyiangan 1 tahun kali sampai umur 3 tahun, dan pemangkasan dilakukan 1 kali pada umur 4 tahun.

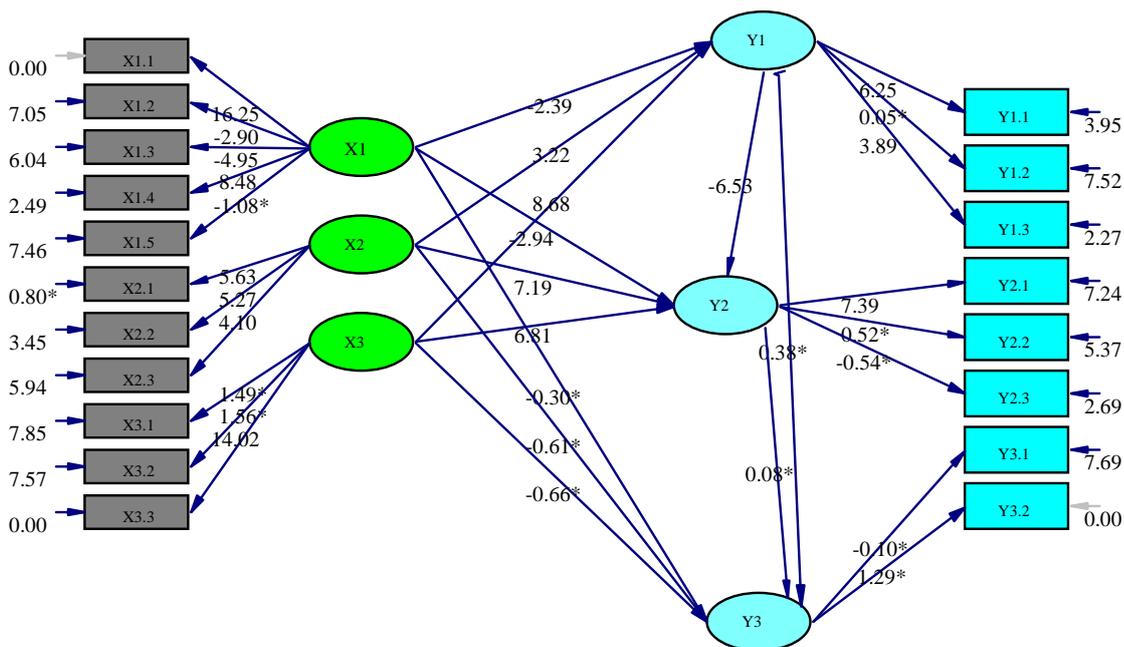
Penguasaan konseptual mengenai hutan rakyat cenderung sedang dan rendah dalam pemahaman hutan

rakyat dan manfaatnya. Mayoritas petani terkategori cukup paham (kategori pemahaman sedang) mengenai hutan rakyat (60.9% di Desa Cikeusal dan 68.9% di Desa Kananga), yaitu sebagai hutan yang dimiliki perseorangan atau hutan di tanah milik sendiri. Namun ternyata masih cukup banyak juga petani di kedua desa (masing-masing 36.2% dan 24.4%) yang tidak memahami esensi hutan rakyat. Pemahaman terhadap manfaat hutan rakyat lebih bervariasi. Di Desa Cikeusal tingkat pemahamannya sedang (60.9%), tapi di Desa Kananga banyak yang tidak paham (51.1%). Kondisi tersebut menunjukkan rendahnya kompetensi konseptual petani dalam hutan rakyat.

Dalam hubungan relasional petani dengan pihak lain, ternyata cukup berpengaruh bagi peningkatan kompetensi petani, walaupun terbatas pada hubungan dengan penyuluh dan sesama petani lainnya. Kondisi tersebut menggambarkan kompetensi relasional petani memang patut dijadikan sebagai daya ungkit untuk meningkatkan kualitas partisipasi petani dalam hutan rakyat (Tabel 3).

Rendahnya partisipasi petani dalam pengelolaan hutan rakyat di Desa Cikeusal dan Desa Kananga (dimana terkategori sebagai partisipasi pasif dan bercirikan pendekatan *top down*), dipengaruhi kuat oleh faktor internal, faktor eksternal, dan kompetensi tersebut. Faktor penyuluhan, kelompok tani dan akses informasi diduga menjadi faktor yang berpengaruh kuat dalam menyebabkan rendahnya partisipasi petani, disamping kapasitas kompetensi teknis dan konseptual yang perlu mendapat perhatian serius. Kondisi ini juga didukung oleh frekuensi penyuluhan yang sangat jarang dan bergantung pada pendanaan proyek. Padahal fungsi kelompok tani dirasakan memiliki pengaruh positif bagi petani, tapi karena frekuensi pertemuan kelompok juga jarang, tidak mampu meningkatkan partisipasi petani. Disamping itu, informasi yang tersebar pada kelompok tani cukup berguna bagi petani, namun karena frekuensinya juga rendah, maka pengetahuan yang terdistribusi pada petani relatif sedikit dan tidak mampu memperbaiki kualitas partisipasi. Dengan demikian, faktor-faktor tersebut harus diperhatikan agar bisa memperbaiki kualitas partisipasi di lokasi penelitian.

Sebagai komparasi, partisipasi petani dalam pengelolaan hutan rakyat kemiri di Maros, Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh tingkat motivasi petani dan kemampuan petani (Suprayitno *et al.* 2011). Tingkat kemampuan petani dalam mengelola hutan kemiri merupakan yang berpotensi mempengaruhi tingkat partisipasi petani dalam pengelolaan hutan kemiri, di mana aspek yang memiliki pengaruh paling dominan adalah kemampuan teknis. Petani sekitar hutan kemiri pada dasarnya telah memiliki kemampuan teknis pengelolaan hutan kemiri yang memadai yang diperoleh secara turun temurun sehingga yakin bahwa mereka mampu untuk tetap mengelola hutan kemiri. Adapun Irawan (2011) melakukan estimasi logit yang menunjukkan bahwa partisipasi petani dipengaruhi oleh umur petani, pendidikan, luas lahan rumah tangga, dan pengalaman petani dalam usaha hutan rakyat di desa Tempurejo, Kabupaten Wonosobo.



Chi-Square=179.70, df=128, P-value=0.00177, RMSEA=0.060

Gambar 2 Diagram jalur analisis variabel yang mempengaruhi partisipasi, kelestarian dan kesejahteraan.

Tabel 2 Kehadiran petani dalam kegiatan penyuluhan

Aspek	Atribut kehadiran	Desa Cikeusal		Desa Kananga	
		Jml (orang)	%	Jml (orang)	%
Kehadiran dalam penyuluhan	Selalu	27	39.13	4	8.89
	Kadang-kadang	36	52.17	32	71.11
	Tidak pernah	6	8.70	9	20
	Jumlah	69	100	45	100
Alasan kehadiran	Silaturahmi dan menambah pengetahuan	44	63.77	23	51.11
	Menambah wawasan dan informasi	16	23.19	9	20.00
	Sakit dan kepentingan lainnya	9	13.04	13	28.89
	Jumlah	69	100	45	100

Tabel 3 Kompetensi petani hutan rakyat di Desa Cikeusal dan Kananga

Jenis kompetensi	Atribut kompetensi	Tingkat pemahaman	Cikeusal		Kananga	
			Jumlah	%	Jumlah	%
Teknis	Persiapan lahan	Tidak pernah	1	1.45	0	0
		Kadang-kadang	8	11.59	5	11.11
		Selalu	60	86.96	40	88.89
	Pemilihan jenis tanaman HR	Dipilih sendiri	54	78.26	42	93.33
		Musyawarah kelompok	15	21.74	3	6.67
		Pemerintah	0	0	0	0
Konseptual	Pemahaman pengertian HR	Tidak paham	25	36.23	11	24.44
		Cukup paham	42	60.87	31	68.89
		Paham	2	2.9	3	6.67
	Pemahaman manfaat HR	Tidak paham	15	21.74	23	51.11
		Cukup paham	42	60.87	16	35.56
		Paham	12	17.39	6	13.33

Jenis kompetensi	Atribut kompetensi	Tingkat pemahaman	Cikeusal		Kananga	
			Jumlah	%	Jumlah	%
Relasional	Membantu petani lain	Tidak pernah	2	2,90	0	0,00
		Kadang-kadang	36	52.17	28	62.22
		Selalu	31	44.93	17	37.78
	Tukar informasi antar petani	Tidak pernah	0	0	0	0
		Kadang-kadang	38	55.07	30	66.67
		Selalu	31	44.93	15	33.33
	Komunikasi dengan pembeli kayu	Tidak pernah	17	24.64	31	68.89
		Kadang-kadang	47	68.12	14	31.11
		Selalu	5	7.25	0	0
Komunikasi dengan industri	Tidak pernah	69	100	45	100	
	Kadang-kadang	0	0	0	0	
	Selalu	0	0	0	0	

Pengaruh Partisipasi terhadap Kelestarian Hutan Rakyat dan Kesejahteraan Petani

Partisipasi secara konseptual berkorelasi langsung dengan kelestarian hutan rakyat dan kesejahteraan petani. Partisipasi yang baik menggambarkan perhatian yang baik dari petani terhadap proses dan kegiatan hutan rakyat sehingga lebih intensif, dan mendorong terwujudnya kelestarian hutan rakyat dan dapat meningkatkan pendapatan. Sebaliknya, partisipasi rendah dapat memberi pengaruh negatif terhadap kelestarian hutan rakyat dan juga pendapatan rumah tangga petani.

Hasil analisis menunjukkan bahwa partisipasi petani berpengaruh secara nyata bagi kelestarian hutan rakyat (Gambar 2). Faktor internal petani, faktor eksternal, serta kompetensi petani juga berpengaruh langsung terhadap kelestarian hutan rakyat di Desa Cikeusal dan Desa Kananga.

Hal demikian tercemrin pada kondisi dimana dalam tingkat partisipasi pasif ternyata hutan rakyat dapat bertahan di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan dan kelestarian hutan rakyat tersebut juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal petani serta kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing petani. Hasil ini relatif sama dengan penelitian Suprayitno *et al.* (2011) di Maros, Sulawesi Selatan, dimana partisipasi petani dalam pengelolaan hutan kemiri memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan manfaat hutan kemiri.

Kondisi demikian diduga sangat terkait dengan aspek historis dan budaya berkebun. Pada masa lalu, masyarakat tidak secara sengaja membangun hutan rakyat, namun sebagai budaya berkebun yang diantara komoditinya terdapat tanaman tahunan. Dalam perkembangan selanjutnya, baru muncul istilah hutan rakyat dan disematkan kepada kegiatan mereka. Identitas hutan rakyat semakin kuat ketika ada program Kebun Bibit Rakyat (KBR) dari pemerintah dan program sertifikasi hutan rakyat.

Selanjutnya, pada dasarnya sertifikasi belum memberikan dampak terhadap pendapatan petani terutama tentang harga jual kayu yang masih sama dengan kelompok tani yang tidak bersertifikasi, adapun

menjadi alasan bahwa kebutuhan kayu di Kecamatan Cimahi hanya untuk mencukupi kebutuhan lokal, sehingga kemampuan tawar petani masih lemah dikarenakan para tengkulak sudah menguasai harga pasar kayu lokal. Hal ini sebagaimana hasil penelitian Hardjanto (2000), dimana pada umumnya posisi tawar petani hutan rakyat pada saat ini masih lemah dibandingkan dengan pihak lain yang lebih mantap secara kelembagaan.

Keberadaan hutan rakyat lebih bersifat sebagai tabungan bagi petani. Petani memperlakukan tanaman kayu sebagai cadangan pemenuhan kebutuhan untuk keperluan mendadak yang jumlahnya besar, seperti keperluan anak sekolah, hajatan keluarga, dan lain-lain. Hal ini terkonfirmasi pada alasan kenapa petani memilih pola pemanenan tebang butuh. Hal demikian sesuai dengan pendapat Achmad *et al.* (2012), Darusman & Hardjanto (2006), dan Setyadi (2009) yang menyatakan bahwa meskipun hasil dari hutan rakyat sudah dirasakan oleh petani dan keluarganya, namun belum dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan utama, karena hasil utama berupa kayu bersifat jangka panjang.

Sejalan dengan itu, ternyata partisipasi petani tidak memberikan pengaruh nyata bagi kesejahteraan petani sebagaimana hasil analisis jalur. Kesejahteraan petani juga tidak dipengaruhi secara nyata oleh faktor internal, faktor eksternal, kompetensi petani, dan kelestarian hutan rakyat. Dengan kata lain, partisipasi mungkin sebenarnya berpengaruh terhadap kesejahteraan petani, namun tidak secara nyata, dan juga berarti ada faktor lain yang memberikan pengaruh bagi kesejahteraan petani secara signifikan yang belum diketahui diluar faktor internal, eksternal, kompetensi petani dan partisipasi petani. Atau dapat juga diduga bahwa kesejahteraan petani lebih banyak disebabkan oleh faktor selain hutan rakyat, seperti pertanian, atau mata pencaharian lain.

Situasi demikian sangat berkaitan dengan faktor kesejahteraan ekonomi rumah tangga petani, dimana ternyata rata-rata pendapatan petani dari hutan rakyat hanya sebesar Rp. 2.617.683,-/tahun di Desa Cikeusal dan Rp. 2.345.807/tahun di Desa Kananga. Jumlah

tersebut hanya sebesar 1.9% dan 4.2% dari rata-rata pendapatan total keluarga responden per tahun pada masing-masing desa. Disamping kecilnya proporsi kontribusi pendapatan hutan rakyat bagi pendapatan petani secara keseluruhan, ternyata jumlah petani hutan rakyat yang telah menikmati hasil pendapatan dari pemanenan kayu hanya 31 orang dari 69 petani hutan rakyat (atau 44.9%) di Desa Cikeusal, dan hanya 14 orang dari 45 petani (31.1%) di Desa Kananga.

Hasil ini jauh lebih rendah dari hasil penelitian Attar (2000) di Desa Sumberejo Kabupaten Wonogiri, memperlihatkan bahwa hasil dari hutan rakyat memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap pendapatan rumah tangga petani. Hasil dari hutan rakyat memberikan kontribusi rata-rata 21.97% terhadap pendapatan rumah tangga petani. Penelitian ini juga lebih kecil dibandingkan dengan hasil kajian Aji *et al.* (2011) pada petani PHBM Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan. Persentase rata-rata pendapatan perbulan dari kayu sebesar 35.79%, dari non kayu sebesar 54.45%, palawija 5.03%, dan upah banjar harian 4.71%. Demikian juga hasil penelitian Setyadi (2009), yang mencatat kontribusi pendapatan hutan rakyat terhadap pendapatan total rata-rata antara 17.87%-20.30%.

Kecilnya kontribusi pendapatan petani hutan rakyat di Desa Cikeusal dan Desa Kananga menunjukkan indikasi kegagalan revolusi hijau di desa kebun dan hutan. Di lokasi penelitian terdapat kesenjangan antara pertanian dan kehutanan, karena tidak ada intensifikasi di kebun dan hutan rakyat. Sebagai perbandingan, distribusi pendapatan petani hutan rakyat pada masing-masing desa di lokasi penelitian disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Pendapatan responden di lokasi penelitian

Pendapatan (Rp/bln)	Desa Cikeusal		Desa Kananga	
	Jumlah (orang)	%	Jumlah (orang)	%
< Rp 1 juta	21	30.4	14	31.1
Rp 1-2 juta	36	52.2	27	60.0
Rp 2-4 juta	7	11.5	4	8.9
> Rp 4 juta	4	5.9	-	-
Jumlah	69	100.0	45	100.0

Rendahnya kontribusi hutan rakyat terhadap pendapatan petani juga berkaitan dengan luas hutan rakyat yang dikejakan. Luas hutan rakyat di kedua desa dengan rata-rata 0.32 ha belum memenuhi luas optimum yang dapat memberikan hasil *break even point* (BEP) bahkan memberikan keuntungan yang wajar. Pendapat ini sesuai dengan Rochmayanto & Supriadi (2012) bahwa rendahnya pendapatan dari hutan rakyat disebabkan oleh belum dicapainya skala usaha (luas) yang optimum. Pada kasus hutan rakyat untuk kayu pulp (*Acacia mangium*) di Kuantan Singingi, Provinsi Riau, skala ekonomisnya dicapai jika luasnya lebih dari 6 ha per KK. Aji *et al.* (2011) juga menekankan syarat luas minimal bagi pengelolaan hutan bersama masyarakat agar diperoleh keuntungan memadai. Hasil

penelitiannya pada program PHBM Kecamatan Japara, Kab Kuningan, ditemukan luas minimum sebesar 3.45 ha di Desa Kalimati, 1.67 ha di Desa Jabaranti. Sedangkan untuk luas minimum HKm berkisar antara 0.57 – 1.05 ha sesuai penelitiannya di Desa Simpang Sari, Desa Tugu Sari, dan Desa Tribudi Syukur.

Adapun menurut hasil kajian Sumarlan *et al.* (2012) yang juga mencatat rendahnya kinerja petani agroforestri Pegunungan Kendeng. Kondisi ini tercermin dari rata-rata tingkat pendapatan, keragaman jenis pangan yang masih kurang, dan jejaring bisnis sistem agroforestri yang tidak berkembang dengan baik. Rata-rata pendapatan petani berada di bawah pendapatan per kapita per tahun Kabupaten Pati. Hal tersebut disebabkan antar lain karena petani menjual hasil panen palawija dan kayu masih tergantung kepada tengkulak dan pemborong.

Padahal, hutan rakyat diharapkan mampu memberikan keuntungan ekonomi yang layak bagi para petani, dan dapat mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Pada pengelolaan hutan rakyat di Ciamis, Jawa Barat, penghasilan dari hutan rakyat diekspektasikan oleh petani berasal dari penjualan pohon, kelapa, kapulaga, pisang, dan hasil hutan rakyat lainnya. Hasil dari penjualan tersebut dapat dimanfaatkan oleh petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk membayar pajak bumi dan bangunan (PBB), dan biaya anak sekolah (Achmad *et al.* 2012).

Jika mencermati indikator kesejahteraan sosial sebagaimana yang Attar (2000) juga lakukan, dimana meliputi bukti kepemilikan yang jelas, tata guna lahan yang mantap, batas-batas kepemilikan lahan yang jelas, dan hubungan antar petani dalam ikatan kerjasama sosial yang kuat dan terpenuhinya kebutuhan sosial psikologis petani. Menurut indikator tersebut kesejahteraan sosial di Desa Cikeusal dan Desa Kananga cukup baik, dimana seluruh anggota kelompok memiliki bukti pemilikan berupa SPPT, dan batas lahan cukup jelas. Namun memang hubungan antar petani terlihat kurang, dimana pertemuan kelompok sangat jarang dilakukan dan tidak terkoordinasi dengan baik.

Walaupun faktor partisipasi petani beserta sejumlah faktor yang berpengaruh terhadapnya, partisipasi petani bukan elemen tunggal yang mempengaruhi keberhasilan hutan rakyat (baik aspek kelestarian hutan rakyat maupun kesejahteraan petani). Hutan rakyat memiliki masalah struktural yang kompleks dan bersinggungan antara berbagai elemen yang banyak, sehingga perlu mempertimbangkan pemecahan yang simultan (Hardjanto 2006) sehingga tetap harus mempertimbangkan faktor lain diluar partisipasi.

Proses sertifikasi di Desa Cikeusal dan Desa Kananga tidak diinisiasi oleh petani sendiri secara mandiri, tapi diinisiasi oleh Sucofindo yang difasilitasi Dinas Kehutanan Kabupaten. Secara operasional proses sertifikasi dikoordinasikan oleh LSM lokal. Jika dalam proses membangun kelompok dan pembangunan kapasitas petani hutan rakyat berjalan dengan baik, inisiasi dari pihak luar tidak menjadi masalah. Namun karena proses pemberdayaan tidak berjalan dengan baik, dimana penyuluhan tidak berjalan intensif, dan

kelompok tani secara mandiri tidak terbangun kapasitasnya sehingga cenderung relatif pasif, serta proses pertukaran informasi hutan rakyat diantara petani tidak berjalan baik, maka partisipasi petani relatif rendah di lokasi penelitian, serta tidak mempengaruhi kualitas kelestarian hutan rakyat dan kesejahteraan petani.

Kelompok tani hutan rakyat dibangun juga tidak atas dasar inisiatif petani. Kelompok tani hutan rakyat lahir karena ada program KBR dan sertifikasi. Kelompok ini berasal dari kelompok tani biasa yang bergerak pada sektor pertanian, bukan sektor kehutanan, yang ada di dua desa kemudian bergabung menjadi kelompok tani hutan rakyat.

Dalam proses sertifikasi VLK, dijumpai juga indikasi elit lokal yang berkoalisi dengan pihak eksternal (Dinas Kehutanan dan LSM) melakukan tindakan *top down* sehingga partisipasi bersifat semu. Sebagai contoh, pengumpulan dokumen untuk pembuatan SPPT dilakukan kolektif atas koordinasi elit lokal. Pemahaman petani yang rendah terhadap esensi sertifikasi lebih ditunjukkan oleh pemahaman sebagian besar petani dimana sertifikasi VLK dianggap sebagai kegiatan pembuatan sertifikasi tanah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi petani dalam pengelolaan hutan rakyat di Desa Cikeusal dan Desa Kananga tergolong rendah, bersifat pasif, dan bercirikan pendekatan *top down*. Partisipasi pada umumnya berbentuk tenaga dan materi, bukan berbentuk ide/gagasan. Partisipasi terjadi pada semua tahapan hutan rakyat (perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan).

Sifat partisipasi demikian dipengaruhi secara nyata oleh faktor internal, faktor eksternal, dan kompetensi petani. Faktor internal petani dibentuk secara nyata oleh variable umur, pendidikan, luas kepemilikan hutan rakyat, dan pengalaman petani. Motivasi tidak mempengaruhi faktor internal karena motivasi petani banyak didorong oleh pihak luar. Faktor eksternal petani (penyuluhan, kelompok tani, dan akses informasi) memberikan pengaruh nyata terhadap rendahnya partisipasi pengelolaan hutan rakyat. Penyuluhan dan pertemuan kelompok kendati masih berlangsung relatif jarang, telah menjadi sarana transfer pengetahuan bagi petani. Faktor kompetensi petani juga memberikan pengaruh nyata terhadap pola partisipasi dalam pengelolaan hutan rakyat. Kompetensi relasional sangat berpengaruh bagi pembentukan kompetensi petani, sementara kompetensi teknis dan kompetensi konseptual petani tidak berpengaruh secara nyata.

Partisipasi petani berpengaruh nyata terhadap kelestarian hutan rakyat, namun tidak berpengaruh bagi kesejahteraan petani. Kelestarian hutan rakyat juga dipengaruhi secara langsung oleh faktor internal, faktor eksternal, dan kompetensi petani. Namun kesejahteraan petani tidak dipengaruhi secara nyata baik oleh faktor internal, faktor eksternal, kompetensi petani, partisipasi, maupun kelestarian hutan rakyat. Hutan rakyat di kedua

desa bersifat statis, turun temurun, dan memberi kontribusi rendah terhadap pendapatan petani.

Saran

Guna memperbaiki partisipasi petani dalam menunjang keberhasilan hutan rakyat di Desa Cikeusal dan Desa Kananga disarankan hal-hal sebagai berikut:

- Penguatan faktor internal petani melalui pendampingan yang intensif.
- Penguatan faktor eksternal petani melalui intensifikasi penyuluhan, pertemuan kelompok, dan pertukaran informasi hutan rakyat melalui berbagai media dan sumber.
- Penguatan kompetensi petani melalui *capacity building*, meliputi pengetahuan teknis, pengetahuan administrasi, manajerial, informasi pasar, dan hubungan masyarakat.
- Ekstensifikasi dan intensifikasi hutan rakyat perlu dilakukan untuk meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan petani. Sistem agroforestry merupakan salah satu bentuk yang dapat dilakukan oleh petani dengan memasukkan tanaman bawah/tanaman pertanian sehingga pendapatan jangka pendek dapat diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, B., H. Simon, D. Diniyati, T.S. Widyaningsih. 2012. Persepsi petani terhadap pengelolaan dan fungsi hutan rakyat di kabupaten ciamis. *Jurnal Bumi Lestari*, 12 (1):123 – 136.
- Achmad B, Soleh M, Undang S, Dani SR. 2004. Kajian Tata Niaga Kayu Rakyat di Kabupaten Kuningan. Makalah Seminar Ekspose Terpadu Hasil-Hasil Penelitian. Yogyakarta (ID): Badan Litbang Kehutanan.
- Aji, G.B., J. Suryanto, R. Yulianti, A. Wirati, A.Y. Abdurrahman, TI. Miranda. 2011. Strategi Pengurangan Kemiskinan di Desa-desa Sekitar Hutan: Pengembangan Model PHBM dan HKm. laporan Penelitian. Pusat Penelitian Kependudukan. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Arupa. 2011. Hutan Rakyat Wonosobo [Internet]. tersedia pada <http://arupa.or.id/mitra/aphr-wonosobo/>: [diunduh pada tanggal 26 Maret 2014].
- Attar M. 2000. Hutan Rakyat: Kontribusi Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Petani dan Perannya Dalam Perekonomian Desa (Kasus di Desa Sumberejo Kab. Wonogiri, Jawa Tengah. Di dalam: Suharjito D, editor. *Hutan Rakyat di Jawa*. Bogor: Fakultas Kehutanan IPB.
- Blackburn, J. and J. Holland. 1997. Who Changes? Institutionalizing Participation in Development.
- Darusman D, Hardjanto. 2006. *Tinjauan Ekonomi Hutan Rakyat*. Prosiding Seminar Hasil Penelitian Hasil Hutan. Jakarta: Departemen Kehutanan.
- Dewi SB, Slamet BY, Nurbaya L. 2004. Peranan hutan rakyat dan sistem pengelolaannya terhadap pendapatan petani di desa wates dan tambah rejo kecamatan gading rejo kabupaten tanggamus. *Jurnal Hutan Rakyat*. VI (2): 65 – 84.

- Diniyati D, Awang SA. 2010. Kebijakan penentuan bentuk insentif pengembangan hutan rakyat di wilayah gunung sawal kabupaten ciamis. dengan metoda ahp. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 7 (2): 129 – 143.
- Fauzi. A. 2009. Partisipasi Petani dalam Pengelolaan Hutan Rakyat (Kasus di Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah). Tesis. Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor.
- Garson D.2003. Path Analysis. School of public & International affairs. North Carolina State University.
- Hapsari, D.T., Suprijanto, M. Sangen, Susilawati. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pada kebun bibit rakyat (studi kasus pengadaan bibit karet untuk petani di kota banjarbaru). *Jurnal Enviro Scienteae*. 8 (2012): 55 – 61.
- Hardjanto. 2000. Pengusahaan Hutan Rakyat di Jawa. Di dalam: Suharjito D, editor. *Hutan Rakyat di Jawa*. Bogor: Fakultas Kehutanan IPB.
- Hardjanto. 2001. Kontribusi hutan rakyat terhadap pendapatan rumah tangga di sub das cimanuk hulu. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*. 7 (2): 47-61.
- Hardjanto. 2006. Model struktural sistem usaha kayu rakyat. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*. 12 (2): 57-68.
- Irawan, E. 2011. Prospek partisipasi petani dalam program pembangunan hutan rakyat untuk mitigasi perubahan iklim di wonosobo. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 12(1): 67-76.
- Nazir M. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor (ID): Ghalia Indonesia
- Ndraha T. 1990. *Pembangunan Masyarakat*. Bandung (ID): Rineka Cipta.
- Priyambodo. 2010. Hutan Rakyat Jawa pasok 40% Kebutuhan Kayu [Internet]. tersedia pada: <http://www.antaraneews.com>. [diunduh pada tanggal 26 Maret 2014].
- Ritchie, B., C. McDougall, M. Haggith, N. B. de Oliveira. 2001. Pedomam Pendahuluan: Kriteria dan Indikator Kelestarian Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat (Community Managed Forest). Jakarta: Center for International Forestry Research.
- Rochmayanto, Y., R. Supriadi. 2012. Skala ekonomis usaha hutan rakyat kayu pulp di kabupaten kuantan singingi, provinsi riau. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 9 (2): 87-95.
- Rutherford, Robert D, Minja Kim Choe. 1993. *Statistical Model for Causa Analysis*. New York: John Wiley & Sons. Inc.
- Setyadi, LB. 2009. Analisis Kelayakan Usaha dan Kontribusi Pengelolaan Hutan Rakyat Koperasi Hutan Jaya Lestari, Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara. Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Bogor: IPB.
- Sevilla CG, Ochave JA, Punsalan TG, Regala BP, Uriarte GG. 1993. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta (ID): UI Press.
- Sumarlan, Sumardjo, P. Tjitropranoto, D.S. Gani. 2012. Peningkatan kinerja petani sekitar hutan dalam penerapan sistem agroforestri di pegunungan kendeng pati. *Jurnal Agro Ekonomi*. 30 (1): 25-39.
- Suprayitno RA, Sumardjo, Gani DS, Sugihen BG. 2011. Model peningkatan partisipasi petani sekitar hutan dalam pengelolaan hutan kemiri rakyat: kasus pengelolaan hutan kemiri kawasan pegunungan bulusaraung kabupaten maros provinsi sulawesi selatan. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 8 (3): 176-195.
- Waskito B. 2000. Hutan Rakyat: Studi Kemungkinan Pengembangan (Kasus di Desa Gunungsari Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah). Di dalam: Suharjito D, editor. *Hutan Rakyat di Jawa*. Bogor (ID): Fakultas Kehutanan IPB.